



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ACIL RUSTIANTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 147040

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.655.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/96 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 20480 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
6. Tanah Seluas 20480 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/160 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
8. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 407 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 2.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	304.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.804.042
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.005.304.042
III. HUTANG	Rp.	209.914.818
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.795.389.224

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.